

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN GARUT

Oleh :

**Indra Kristian**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Alghifari

E-mail : technician2007@gmail.com

### ABSTRAK

*Kemiskinan seakan menjadi permasalahan yang sangat sulit untuk di atasi oleh negara Indonesia tidak terkecuali di Kecamatan Pamulihan. Tercatat data penduduk miskin di Kecamatan Pamulihan berjumlah sekitar 3.795 keluarga dari 19.873 keluarga. Jika dipersentasekan, jumlah penduduk miskin di Kecamatan Pamulihan yaitu sekitar 20,1%. Permasalahan yang muncul pada penelitian ini yaitu adanya penyaluran bantuan PKH yang belum tepat sasaran, kurangnya pendampingan, serta komunikasi tidak berjalan dengan lancar. Tujuan dari Penelitian ini untuk mengatasi permasalahan yang ada mengenai adanya penyaluran bantuan PKH yang belum tepat sasaran, kurangnya pendampingan, serta komunikasi tidak berjalan dengan lancar dengan pisau analisis menggunakan teori dari Edward III tentang Implementasi Kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Deskriptif dengan teknik pengumpulan data: studi pustaka, wawancara, dan observasi. Hasil dari penelitian dilapangan terhadap implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Pamulihan yaitu dalam hal komunikasi pendamping sangat kesulitan dikarenakan faktor sinyal telekomunikasi yang belum menjangkau seluruh wilayah kecamatan pamulihan, terkait sumber daya yaitu seluruh pendamping PKH dapat dikatakan berkompeten dalam melaksanakan tugasnya, selanjutnya dilihat dari unsur disposisi yaitu dalam pelaksanaannya pendamping PKH masih belum maksimal dalam mendampingi para KPM terutama para KPM yang bertempat tinggal di wilayah yang sangat jauh dari pusat Kecamatan Pamulihan, serta untuk KPM yang tergolong sudah mampu mereka belum dapat diberi arahan oleh pendamping agar segera mengundurkan diri dari keanggotaan penerima bantuan PKH, namun demikian para Pendamping berusaha agar penyaluran bantuan PKH dapat tepat sasaran. Terakhir terkait birokrasi yaitu seluruh pihak yang terkait baik itu dari pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa, para tokoh masyarakat seluruhnya saling bekerjasama agar implementasi bantuan PKH berjalan dengan lancar.*

**Kata Kunci : Impelementasi Kebijakan,Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial**

#### A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan *issue strategis* dalam pembangunan di sebuah Negara, namun kemiskinan sering kali menjadi hambatan bagi negara berkembang dalam proses pembangunan, seperti di

Indonesia. Masalah kemiskinan memang pekerjaan besar bagi pemerintah kita, berbagai cara telah dilakukan tapi masih belum bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal antara lain

rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Kemiskinan seakan menjadi permasalahan yang sangat sulit untuk di atasi oleh negara Indonesia tidak terkecuali di Kecamatan Pamulihan. Tercatat data penduduk miskin di Kecamatan Pamulihan berjumlah sekitar 3.795 keluarga dari 19.873 keluarga. Jika dipersentasikan, jumlah penduduk miskin di Kecamatan Pamulihan yaitu sekitar 20,1%. Untuk itu perlu adanya perhatian khusus terhadap masalah kemiskinan di Kecamatan Pamulihan agar bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan dapat menurunkan atau bahkan menghilangkan permasalahan kemiskinan tersebut. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu langkah dan juga upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan. Program ini bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Program Keluarga Harapan memperhatikan kesenjangan yang terjadi di kehidupan masyarakat seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial.

Di Kecamatan Pamulihan, Implementasi Program Keluarga Harapan belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal dikarenakan ada beberapa fenomena permasalahan yang terjadi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pada aspek komunikasi, proses sosialisasi tentang kebijakan pemerintah tentang PKH berjalan dengan sangat lambat sehingga implementasi PKH belum bisa dilaksanakan dengan maksimal.
2. Pada aspek Sumber Daya, beberapa KPM mengeluhkan adanya pendamping yang kurang memperhatikan para KPM

dampingannya seperti kurangnya kegiatan pertemuan rutin atau bahkan dalam proses pencairan terdapat KPM yang menyebutkan tidak didampingi oleh Pendamping PKH serta dalam pemutakhiran datapun kerap kali dilakukan tanpa mengkonfirmasi kepada KPM.

3. Pada aspek Disposisi atau Kecenderungan, ada beberapa KPM yang sebenarnya secara status sosialnya sudah tidak layak mendapatkan bantuan PKH..
4. Pada aspek Struktur Birokrasi, Implementasi PKH melibatkan berbagai pihak dari mulai Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pendamping PKH serta unsur masyarakat juga ikut membantu. Struktur birokrasinya masih terdapat praktek *nepotisme* yaitu lebih mendahulukan saudara, kerabat, hingga teman sebagai calon KPM PKH hal tersebut juga dapat berpengaruh terhadap penyaluran bantuan PKH sehingga tidak tepat sasaran.

Dari latar belakang di atas dapat dilihat bahwa implementasi program keluarga Harapan di Kecamatan Pamulihan belum sepenuhnya terlaksana, karena adanya beberapa fenomena permasalahan dalam Implementasi PKH di Kecamatan Pamulihan, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan **“Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut”**.

## B. KAJIAN PUSTAKA

Nugroho (2009: 503-515) menyatakan bahwa, untuk memahami implementasi sebuah kebijakan, terdapat sembilan model implementasi kebijakan

yang dapat dijadikan dasar teori yaitu model Edward, Van Mater dan Van Horn, Grindle, Mazmanian dan Sabatier, Hogwood dan Gunn, Goggin, Elmore dan Model Jaringan. Namun dalam penelitian ini, hanya empat model yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka, mengingat empat model tersebut memiliki beberapa kemiripan, dan sesuai dengan design penelitian ini.

### 1. Model Edwards III

Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor (1) Komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. (Edward III dalam Agustino 2012:149).

#### a. Komunikasi

Variabel atau Faktor pertama adalah Komunikasi. Menurutnya lebih lanjut, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus diransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan

setiap kebijakan yang ditetapkan didalam masyarakat.

Terdapat tiga Indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu :

#### 1) Transmisi

Transmisi, Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

#### 2) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua).

#### 3) Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

#### b. Sumber Daya

Variabel atau faktor kedua adalah Sumber daya. Edward III dalam Agustino (2012:151) Mengemukakan indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

1) Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya pembagian tugas

oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi tetapi diperlukan pulak kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- 2) Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Dan kedua mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- 3) Wewenang, bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan legitimasi atau otoritas bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- 4) Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Disposisi

Variabel ketiga faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik (Edward III

dalam Agustino (2012:152) adalah Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan suatu kebijakan publik.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel/faktor disposisi, menurut Edward III adalah:

- 1) Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil ada yang tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi.
- 2) Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasikan insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang,

ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. (Edward III dalam Agustino (2012:153).

## 2. Model Merilee S. Grindle

Menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono 2013: 93), terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

### 1) Variabel isi kebijakan

Mencakup: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh *target group*; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) apakah letidak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementor dengan rinci; dan (6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

### 2) Variabel lingkungan kebijakan

Mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

## 3. Model Mazmanian dan Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier

(dalam Subarsono 2013: 94), dan Nugroho (2008: 215), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi:

1) Mudah tidaknya masalah dikendalikan (*tractability of the problem*). Kategori *tractability of the problem* mencakup variabel-variabel yang disebutkan oleh Subarsono (2013: 95): “(1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. (2) Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. (3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi (4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan”.

2) Kemampuan kebijakan untuk menstrukturisasikan proses implementasi (*ability of statute to structure implementation*). Kategori *ability of statute to structure implementation* mencakup variabel-variabel yang disebutkan oleh Subarsono (2013: 97), antara lain: (1) Kejelasan isi kebijakan (2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis (3) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut (4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar instansi pelaksana (5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana (6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan (7) Seberapa luas akses kelompokkelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

3) Variabel di luar kebijakan/variabel lingkungan (*non-statutory variables affecting*

*implementation*). Subarsono (2013: 98), menyebutkan kategori *non-statutory variables affecting implementation* mencakup variabel yang terdiri dari: (1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi (2) Dukungan publik terhadap kebijakan (3) Sikap dari kelompok pemilih (*constituent groups*) (4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

#### 4. Model Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Nugroho 2009: 503-515), terdapat enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi dan politik, disposisi Implementor.

Selanjutnya variabel-variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn tersebut dijelaskan secara rinci oleh Subarsono, (2013: 99), adalah sebagai berikut:

- a. Standar dan sasaran kebijakan  
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.
- b. Sumber daya  
Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya nonmanusia (*non-human resources*). Dalam berbagai kasus

program pemerintah, seperti Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.

- c. Hubungan antar organisasi  
Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- d. Karakteristik agen pelaksana  
Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.
- e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi  
Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah *elite* politik mendukung implementasi kebijakan.
- f. Disposisi implementor  
Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang

dimiliki oleh implementor. Kebijakan sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan.

Berdasarkan relevansi penelitian dengan objek penelitian maka peneliti memilih model yang dikembangkan oleh Edward III sebagai landasan teoritis penelitian. Dalam model Edward III, implementasi kebijakan publik meliputi komunikasi, sumber-sumber, disposisi dan struktur birokrasi. Alasan peneliti mengambil model implementasi dari Edward III yaitu karena model implementasi dari Edward III memiliki pendekatan yang dapat mempresentasikan Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pamulihan.

### C. METODE PENELITIAN

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu metode Deskriptif Kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif Bungin dalam Indra (2021:15) mengatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan mencatat semua temuan mengenai Program Keluarga Harapan secara umum dalam setiap pembahasan penelitian yang diperoleh dalam literatur dan sumber, dan atau temuan terbaru mengenai Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH).

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif di mana jenis data

yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih dimengerti. Setelah itu, ditarik kesimpulan dari data tersebut, sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Pada mulanya kecamatan Pamulihan merupakan cikal bakal berdirinya kecamatan Pakenjeng, dimana sebelum tahun 1973 desa Pakenjeng (ibu kota kecamatan Pamulihan) merupakan ibu kota kecamatan Pakenjeng namun pada tahun 1973 oleh camat Pakenjeng dipindahkan ke Kp. Sindangratu desa Gunung Masigit (desa Jatiwangi sekarang) dan desa Pakenjeng menjadi bagian dari wilayah kerja kecamatan Pakenjeng.

Mulai tahun 1980 desa Pakenjeng secara bertahap dimekarkan menjadi 5 (lima) desa yaitu desa Pakenjeng, desa Garumukti, desa Linggarjati, desa Panawa dan desa Pananjung. Sejak tahun 1982 wilayah bekas desa Pakenjeng lama dijadikan perwakilan kecamatan atau kemantren dengan kepala kemantren pertama bapak JF. Gartiwa, BA, kemudian dilanjutkan oleh bapak Drs. Burhanudin Afif, bapak Yoyon Taryono dan kapermet terakhir adalah bapak Udin Syaripudin. Pada tahun 1992 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pembentukan wilayah Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang dan Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut dan diresmikan oleh gubernur Jawa Barat

bapak HR. Yogi SM pada tanggal 7 Februari 1992 dengan camat pertama dijabat oleh bapak Drs. Dadang Abdulah, kemudian dilanjutkan oleh bapak Drs. Darsani, M.Si, bapak Drs. Oon Syahroni, bapak Drs. TB. Soefyani, bapak Drs. S. Khiban, M.Sc. bapak Drs. Firman Karyadin, bapak Muhamad Toha, S.Sos, bapak Drs. Rachmat Supriatin, bapak Asep Harsono HS, S.Sos., M.Si dan Sekarang bapak Iwan Riswandi, S.IP.

## 2. Sejarah Kecamatan Pakenjeng

Kecamatan Pamulihan merupakan salah satu kecamatan yang ada di daerah Garut Selatan. Selain itu kecamatan Pamulihan terletak didekat Gunung Papandayan bahkan ada wilayah perkebunan gunung Papandayan yang masuk ke wilayah Kecamatan Pamulihan. Kondisi geografis yang berbukit-bukit dan memiliki ketinggian rata-rata 660-1200 meter diatas permukaan laut (mdpl), serta luas wilayah sekitar 14.372 Ha, dengan batas-batas wilayah yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cisurupan dan Cikajang.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pakenjeng.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bungbulang dan Kabupaten Bandung.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cikajang.

## 3. Pembahasan

Untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pamulihan peneliti menggunakan teori Implementasi dari Edward III yang memiliki 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam Implementasi yaitu Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam analisis implementasi Program Keluarga Harapan

di Kecamatan Pamulihan peneliti menggunakan 4 faktor tersebut dalam pendekatan penelitian yang hasilnya dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Komunikasi (*communication*)

Faktor yang mempengaruhi implementasi menurut Edward III yang pertama adalah komunikasi. Unsur yang terkandung dalam komunikasi mencakup transmisi, konsistensi serta kejelasan. Ketiga unsur tersebut dapat diartikan bahwa informasi terkait Program Keluarga Harapan yang diberikan terhadap masyarakat harus sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh para pemangku kebijakan yang tercantum dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program

Keluarga Harapan. Selain itu informasi yang diberikan kepada masyarakat juga harus konsisten agar tidak terjadi kesalahpahaman atau *miss communication* antara para pelaksana dan masyarakat. Kemudian informasi yang diberikan juga harus jelas agar masyarakat bisa memahami dengan baik informasi yang diberikan oleh para pelaksana. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis faktor komunikasi berdasarkan unsur dari Komunikasi tersebut yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Transmisi

Unsur transmisi ini berkaitan dengan bagaimana meneruskan putusan kebijakan terhadap personil sebelum putusan-putusan tersebut dapat diikuti. Jika kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksana harus jelas dan dapat difahami. Jika petunjuk pelaksana tidak jelas, maka implementor akan kebingungan dengan apa yang akan dilakukan. Dalam wawancara dengan Koordinator PKH kecamatan Pamulihan, beliau menuturkan sebagai berikut:

Para pendamping PKH merupakan orang-orang yang berhadapan langsung dengan masyarakat, untuk itu sebelum terjun ke lingkungan masyarakat para Pendamping melaksanakan bimtek (bimbingan teknis) terlebih dahulu tentang bagaimana cara penyampaian informasi terkait program keluarga harapan ini dari mulai penyampaian maksud dan tujuan program PKH, landasan hukumnya, hak dan kewajiban para KPM, serta sanksi yang diberikan jika KPM melanggar aturan yang berlaku tersebut. Adapun bimtek ataupun rakor biasanya dilakukan setiap 1 bulan sekali.

Menurut penuturan beliau sebelum melaksanakan sosialisasi terkait Program Keluarga Harapan selalu diadakan bimtek terlebih dahulu agar informasi yang diberikan sesuai dengan putusan dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh para pemangku kebijakan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa informasi yang diterima oleh para KPM ataupun masyarakat yang berada di Kecamatan Pamulihan jelas dan konsisten.

#### b. Konsistensi

Dalam penyampaian informasi dari pemerintah pusat tentu harus konsisten dan tetap agar tidak terjadi penyelewengan informasi yang diterima. Untuk itu para pendamping PKH khususnya di Kecamatan Pamulihan sangat memegang teguh buku Pedoman dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Dalam wawancara dengan Koordinator PKH beliau mengatakan bahwa:

Kami selaku pendamping PKH di Kecamatan Pamulihan akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas kami. Semua intruksi yang diberikan oleh pemerintah pusat kami laksanakan sesuai dengan arahan tersebut. Kami tidak pernah menambah atau mengurangi

informasi yang diberikan oleh pemerintah pusat terkait dengan Program Keluarga Harapan ini. Maka dari itu kami insya allah akan menjamin bahwa informasi yang diberikan kepada para KPM ataupun masyarakat umum akan bersifat konsisten dan tetap. Ketika dari atasan harus menyampaikan A ya kami dilapangan pasti menyampaikan A, ketika pimpinan menyampaikan B ya kami dilapangan mengikuti harus menyampaikan B seperti itu barangkali neng.

Dalam wawancara tersebut koordinator PKH menyebutkan bahwa dia menyampaikan informasi sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pemerintahan pusat. Ketika dia mendapatkan informasi terkait dengan Program Keluarga Harapan, maka mereka para pendamping akan meneruskan informasi tersebut dan tidak ada unsur tambahan atau unsur pengurangan dalam informasi tersebut.

#### c. Kejelasan

Selanjutnya adalah unsur kejelasan dalam informasi terkait dengan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pamulihan. Unsur kejelasan juga tak kalah pentingnya dalam kaitannya dengan informasi karena ketika informasi yang diberikan jelas maka penerima informasi akan dapat memahami tentang maksud dan tujuan dari informasi tersebut. Terkait dengan Kejelasan informasi Koordinator PKH menerangkannya dalam wawancara yang isinya sebagai berikut:

Untuk kejelasan informasi sudah ada aturan yang menjadi acuan atau pedoman tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Didalam peraturan tersebut sudah dijelaskan secara rinci mulai dari Maksud dan Tujuan PKH, hak dan kewajiban, pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan PKH serta sanksi yang berlaku apabila ada pelanggaran yang

terjadi. Dalam penyampaian informasi kami tinggal mengikuti acuan dari peraturan tersebut karena itu sudah sangat jelas adapun tambahannya dari Rakor. Peraturannya yaitu Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Terkait dengan kejelasan informasi, Koordinator PKH tersebut menjelaskan bahwa dalam penyampaian informasi itu tinggal mengacu pada peraturan yang ada karena disana sudah sangat jelas tertera apasaja yang harus diinformasikan terhadap para KPM atau masyarakat yang ada di lingkungan Kecamatan Pamulihan adapun tambahan informasi itu didapatkan dari Rakor (Rapat Koordinasi).

Selanjutnya peneliti bertanya terkait dengan sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat di Kecamatan Pamulihan yang kemudian dijelaskan oleh Bapak Pendamping PKH sebagai berikut:

Sosialisasi terkait PKH dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat kecamatan melalui pemerintah kecamatan pamulihan ke tingkat pemerintahan desa bahkan sampai ke tingkat dusun dan RT bahkan RW, dengan cara mengadakan rembuk bersama tokoh masyarakat terkait Petunjuk dan Pelaksanaan Teknis PKH.

Menurut beliau sosialisasi tentang PKH dimulai dari tingkat kecamatan hingga pada tingkat RT. Jadi dilakukan rembuk tentang petunjuk teknis pelaksanaan teknis PKH. Dengan begitu seluruh pihak dapat mengetahui tentang petunjuk teknis pelaksanaan PKH. selain itu beliau menambahkan tentang apa saja yang disosialisasikan kepada masyarakat yaitu sebagai berikut:

Yang di Informasikannya adalah Terkait Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang masuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kemudian

masuk pada Kriteria Penerima Mafaat PKH, kemudian meng informasikan Besaran uang bantuan yang akan diterima KPM PKH sesuai Komponen/Tanggungjawab yang dimilikinya. Selain itu yang di informasikannya berkaitan dengan : Dasar Hukum PKH, Tujuan PKH, Kriteria Penerima Mafaat dan Hak dan Kewajiban Penerima Manfaat PKH.

Beliau menuturkan bahwa dalam proses sosialisasi kepada pihak-pihak terkait terutama para KPM, para Pendamping PKH menyampaikan informasi yang berkaitan dengan Dasar Hukum, Tujuan PKH, Kriteria Penerima Manfaat, Hak dan Kewajiban para KPM PKH.

Selanjutnya pendamping PKH dalam wawancara juga menjelaskan Hak dan Kewajiban bagi para Keluarga Penerima Manfaat. Para KPM PKH berhak mendapatkan:

- a. Bantuan sosial PKH
- b. Pendampingan sosial PKH
- c. Pelayanan di fasilitas kesehatan dan/atau kesejahteraan sosial, dan
- d. Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan pemenuhan dasar lainnya

Kemudian para KPM PKH juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui anak usia dini (0-6 tahun) yang belum bersekolah wajib memeriksakan kesehatan pada fasilitas/layanan kesehatan sesuai protokol kesehatan.
- b. Komponen pendidikan terdiri dari anak usia sekolah wajib

belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85%

- c. Komponen kesejahteraan sosial terdiri dari lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas berat wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali
- d. KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kualitas keluarga (P2K2) setiap bulan.
- e. Seluruh anggota KPM harus memenuhi kewajibannya kecuali jika terjadi keadaan kahar (*force majeure*)
- f. KPM yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi. Mekanisme sanksi ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan verifikasi komitmen
- g. (Lebih lengkapnya ada di dalam Pedoman Umum PKH tahun 2021)

Setiap KPM PKH diharuskan mengikuti aturan yang berlaku, dan jika para KPM PKH melakukan pelanggaran mereka akan dikenakan sanksi. Hal ini juga dijelaskan oleh Pendamping PKH yaitu sebagai berikut:

KPM yang tidak mematuhi Kewajibannya di teliti terlebih dahulu apakah tidak mematuhinya itu karena kesengajaan atau kita yang belum memberikan Informasi kepada KPM tersebut, kalau memang karena kesengajaan dengan sistem yang ada KPM tersebut akan termasuk pada KPM yang Tidak komponen sehingga Bantuan sosialnya di tangguhkan.

Jika ada KPM PKH yang melakukan

pelanggaran jadi diteliti terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukannya lalu setelah itu diberikan sanksi yaitu ditangguhkan dalam pencairan bantuan PKH miliknya.

## 2. Sumber Daya (*resource*)

Faktor *resources* berhubungan dengan sumber daya yang ada dalam implementasi Program Keluarga Harapan baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pamulihan peneliti mencoba untuk menganalisis tentang sumber daya apa saja yang ada dalam implementasi tersebut, berikut adalah hasil wawancara dengan Pendamping PKH terkait dengan Sumber daya yang ada dalam implementasi PKH di Kecamatan Pamulihan yang menyebutkan bahwa:

Pada pelaksanaannya di Kecamatan Pamulihan sendiri ada berbagai sumber daya yang mendukung dalam implementasi PKH yang pertama ada sumber daya manusia yaitu para pendamping PKH, kemudian ada juga dari pihak desa, kecamatan, serta tokoh masyarakat semuanya saling berkoordinasi untuk membantu agar implementasi program keluarga harapan di kecamatan pamulihan berjalan dengan lancar serta tepat sasaran. Kemudian ada sumber daya lainnya seperti sumberdaya keuangan yaitu biaya operasional dan juga insentif bagi para pendamping PKH. Selain itu ada juga sumber daya untuk menunjang pelaksanaan program pkh seperti buku pedoman bagi para pendamping tentang bagaimana memberikan materi pada tiap pertemuan engan para KPM.

Dari penuturan pendamping PKH diatas terkait dengan sumber-sumber atau *resources* dalam Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan

Pamulihan beliau menyebutkan bahwa ada beberapa sumber daya pendukung dalam Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pamulihan diantaranya yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah pendamping PKH, kemudian ada dari Pihak Pemerintahan Desa, pihak Pemerintahan Kecamatan serta tokoh masyarakat. Selain itu ada juga sumber daya non-manusia seperti yang beliau katakan adalah insetif untuk menunjang para Pendamping dalam melaksanakan tugasnya serta sumber daya lain berupa buku pedoman atau materi yang dijadikan bahan atau acuan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendamping PKH.

Kemudian Peneliti bertanya terkait dengan sumber daya manusia yang berperan sebagai pendamping PKH di Kecamatan Pamulihan yang kemudian dijelaskan oleh terkait dengan peran para Pendamping PKH yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan sosialisasi PKH kepada aparat pemerinyah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, organisasi perangkat daerah, dan masyarakat
- b. Melakukan pertemuan awal dan validasi data calon KPM PKH
- c. Melakukan verifikasi komitmen kehadiran anggota KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan pada waktu yang telah ditetapkan
- d. Melakukan pendampingan KPM PKH dalam fasilitas akses layanan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan komitmen dan kewajiban sesuai ketentuan.

- e. Melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap terjadi perubahan
- f. Melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) bagi seluruh KPM PKH sesuai dengan waktu yang telah di tentukan
- g. Melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada KPM PKH untuk memperoleh bantuan sosial PKH dan bantuan program komplementair lainnya.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi PKH di Kecamatan Pamulihan belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal hal itu dapat dilihat bahwa dari segi komunikasi yaitu adanya KPM yang kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan Pendamping PKH yang diakibatkan oleh susahnya jaringan telekomunikasi yang mengakibatkan penyampaian informasi menjadi terhambat. Selanjutnya dari segi Sumber Daya yaitu adanya KPM yang merasa kurang diperhatikan oleh Pendamping PKH yang diakibatkan oleh letak pemukiman yang jauh dari Pusat Pemerintahan Kecamatan Pamulihan selain itu juga dikarenakan akses jalan yang rusak.

Kemudian dari segi Disposisi yaitu adanya KPM yang cenderung tidak mau dilakukan pemutakhiran data padahal dia sudah tergolong mampu ataupun sudah tidak memiliki komponen PKH. Kemudian yang terakhir terkait dengan Struktur Birokrasi tidak ada permasalahan yang dapat menghambat jalannya Implementasi PKH di Kecamatan Pamulihan, seluruh

pihak yang terkait dengan Implementasi PKH sangat mendukung sekali adanya Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pamulihan.

Dalam implementasi PKH di Kecamatan Pamulihan tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar, ada beberapa faktor yang menghambat dalam Implementasi PKH di Kecamatan Pamulihan yaitu, Pertama adalah infrastruktur jalan yang rusak cukup menghambat dalam proses Implementasi PKH baik itu dalam penyaluran bantuan PKH maupun dalam hal Pendampingan para KPM PKH. Kedua yaitu faktor jaringan selular atau jaringan telekomunikasi yang kurang menjangkau para KPM yang berada di wilayah pegunungan yang jauh dari Pusat Pemerintahan Kecamatan Pamulihan juga menghambat dalam Implementasi PKH karena jika ada informasi yang harus disampaikan kepada Para KPM PKH itu sangat sulit dilakukan karena tidak dapat berkomunikasi jarak jauh.

Dalam mengatasi hambatan-hambatan diatas, para Pendamping PKH melakukan beberapa upaya diantaranya yaitu untuk faktor penghambat yang pertama yaitu terkait jalan rusak, para pendamping PKH mencari jalan alternatif yang lain yang lebih baik agar dapat sampai ke tempat para KPM tersebut. Kemudian untuk mengatasi hambatan yang kedua yaitu terkait dengan KPM yang tidak dapat terjangkau sinyal telepon, para Pendamping PKH meminta bantuan kepada KPM yang tempat tinggalnya berdekatan dengan KPM yang tidak terjangkau sinyal tersebut sehingga informasi bisa tersampaikan dengan cepat.

## 2. Saran

- a. Diharapkan masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan PKH

untuk dibantu agar bisa mendapatkan bantuan PKH.

- b. Diharapkan para pendamping PKH agar selalu melakukan pendataan ulang atau update data terhadap KPM agar bisa diketahui siapa saja yang sudah tidak layak mendapat bantuan sehingga penyaluran bantuan PKH bisa lebih tepat sasaran.
- c. Diharapkan pemerintahan ikut mendorong kemajuan infrastruktur jalan yang ada di Kecamatan Pamulihan khususnya di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau kendaraan karena jalannya yang rusak dan terjal sehingga dalam implementasi PKH bisa berjalan dengan lancar. Selain infrastruktur jalan, diharapkan pemerintah juga memperhatikan infrastruktur telekomunikasi agar dapat menjangkau tempat-tempat yang jauh dari pusat pemerintahan Kecamatan Pamulihan.
- d. Diharapkan juga para KPM ikut membantu proses Implementasi PKH agar bisa berjalan dengan lancar juga yaitu dengan aktif dalam berkomunikasi ataupun aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan serta saling membantu dan saling memajukan antar KPM PKH.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar*

- Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Albrow, Martin. 2007. *Birokrasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Anderson, James A. 1975. *Public Policy Making: Basic Concept in Political Sciences*. New York: Praeger University Series.
- Anderson, James E. 1978. *Public Policy Making*. Second Edition, Chicago, Holt, Rinehart and Winston.
- Anto Dajan. 1986. *Pengantar Metode Statistik II*. Jakarta: LP3ES
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Booklet Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*. Jakarta.
- Budi W. 2007. *Kebijakan Publik:Teori dan Proses (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Media Pressindo, hal.15
- Dye, Thomas R.. 1981. *Understanding Public Policy, Englewood Chief*. New Jersey : Prentice-Hall Inc.
- Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat; Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Kristian, I. (2021). EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI JALAN KIARA CONDONG KOTA BANDUNG. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 23-34.
- J.L. Pressman and Wildavsky. 1973. *Implementation*. Barkley and Los Angeles: University of California Press. Hal 17.
- Jones, C. O. 1984. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Monterey, CA: Brooks/Cole Publishing Company
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, Dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- M.Irfan Islamy. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta,: Bumi Aksara. Hal.12.
- Nawawi, Hadari. 1999. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Dinamika
- Nawawi, Ismail. 2009. *Prilaku Administrasi Kajian,Teori dan Praktis*,. Surabaya: ITSPers.
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant D. 2004. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Alex Media.
- Nugroho, Riant D. 2008. *Public Policy* . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant D. 2009. *Publik Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- P. Siagian, Sondang. 2002. *Kepemimpinan Organisasi & Perilaku Administrasi*. Jakarta: Penerbit Gunung Agung.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: ALFABETA
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian. Sondang P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian UNPAD.

- The Liang Gie. 1999. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty
- Thoha, Miftah. 1984. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- William N. Dunn. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press. Hal.21.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
- Peraturan Bupati Nomor 250 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Pola C
- Peraturan Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor : 01/LJS/08/2018 tentang Kode Etik SDM PKH.